



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI SUMBER PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PENDEKATAN 3R (*REDUCE, REUSE, RECYCLE*) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TASIKMALAYA

**Chintiya Nurul Fadya, Agus Fatah Hidayat, Ivan Dickson
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

chintianurul1@gmail.com¹, agusfatahhidayat18@gmail.com², dicksanivan@gmail.com³

Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama di wilayah perkotaan. Di Kota Tasikmalaya, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di sumber melalui pendekatan Reduce, Reuse, Recycle (3R) menjadi strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat masih rendah. Mayoritas masyarakat hanya melakukan pengumpulan sampah tanpa adanya upaya pemilahan, pengurangan, atau pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan berbagai peraturan dan program untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis 3R sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pengawasan dan penegakan aturan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di sumber berjalan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi di lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah diterapkan, implementasinya belum berjalan secara optimal. Faktor utama yang menghambat efektivitasnya meliputi kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan, keterbatasan infrastruktur pemilahan sampah, serta rendahnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R di Kota Tasikmalaya. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, penyediaan fasilitas yang lebih memadai, pengawasan yang lebih ketat, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengolahan dan daur ulang sampah. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di sumber dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)



Abstrack

Waste management is one of the major challenges in maintaining environmental sustainability, especially in urban areas. In Tasikmalaya City, the implementation of waste management policies at the source through the Reduce, Reuse, Recycle (3R) approach has been adopted by the Environmental Agency to minimize the negative impact of waste on the environment. However, in practice, public participation remains low. Most people only collect waste without making efforts to sort, reduce, or recycle it.

The Tasikmalaya City Government has issued various regulations and programs to support 3R-based waste management according to community needs. However, the implementation of these policies still faces several challenges, such as low public awareness, limited facilities and infrastructure, and weak supervision and law enforcement.

This study uses a qualitative research method with a descriptive approach to analyze how waste management policy implementation at the source is carried out. Data were collected through interviews with relevant stakeholders, field observations, and document studies. The results indicate that although the policy has been implemented, its execution has not been fully effective. The main obstacles include a lack of continuous public education, inadequate waste sorting infrastructure, and weak collaboration between the government, the community, and the private sector.

The conclusion of this study suggests that a more comprehensive strategy is needed to enhance the effectiveness of 3R-based waste management policies in Tasikmalaya City. Efforts that can be taken include increasing public education and awareness, providing better facilities, enforcing stricter regulations, and strengthening cooperation with various stakeholders in waste processing and recycling. With these improvements, the implementation of waste management policies at the source is expected to be more effective and sustainable.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk yang besar serta meningkatnya aktivitas di kota-kota Indonesia menyebabkan berbagai permasalahan infrastruktur, termasuk pengelolaan sampah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan produksi sampah terbesar di dunia, sehingga memerlukan penanganan serius. Seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, produksi sampah terus meningkat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Menurut UU No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah mencakup pengurangan dan penanganan sampah agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dan sektor



swasta. Saat ini, sampah mulai dipandang sebagai sumber daya yang dapat didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi.

Di Kota Tasikmalaya, permasalahan sampah semakin serius dengan meningkatnya jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 700.000 jiwa. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya mencatat produksi sampah harian sekitar 300 ton, yang sebagian besar berasal dari rumah tangga dan pasar tradisional. Namun, hanya 60-70% dari total sampah yang berhasil diangkut ke TPA Ciangir, sementara sisanya (90-120 ton) tidak tertangani dengan baik, sering kali dibuang sembarangan atau dibakar.

TPA Ciangir menghadapi kendala kapasitas karena masih menggunakan sistem open dumping yang tidak ramah lingkungan. Minimnya fasilitas pengolahan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah memperburuk situasi. Akibatnya, TPS liar semakin bermunculan di berbagai sudut kota.

Sistem pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya menggunakan dua metode utama:

1. Metode Wadah Angkut (*Hauled Container System*), sampah dikumpulkan dalam kontainer dan diangkut ke TPA menggunakan *Arm Roll Truck*.
2. Metode Wadah Tinggal (*Stationary Container System*), sampah langsung diangkut dari lokasi sumber menggunakan *dump truck*, cocok untuk kawasan perumahan dan area komersial.

Selain itu, kendaraan *pick-up* dan motor roda tiga juga digunakan untuk area dengan akses jalan sempit. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah, hanya sebatas pengumpulan tanpa pemilahan atau pengurangan. Meski demikian, beberapa kelompok masyarakat mulai berinisiatif mengelola sampah melalui daur ulang dan pengolahan limbah organik.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan regulasi, seperti:

- Perda No. 7 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- Perwali No. 22 Tahun 2019 tentang kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga.

Namun, keterbatasan infrastruktur, kurangnya fasilitas daur ulang, serta sistem pengangkutan yang belum optimal menjadi kendala utama. Berdasarkan Hasil Obsevasi yang penulis peroleh ditemukan bahwa ada beberapa permasalahan, yaitu:

1. Masyarakat masih rendah partisipasinya dalam pengelolaan sampah, hanya melakukan pengumpulan tanpa ada upaya pengurangan sampah dan pemilahan sampah.
2. Pemerintah kota Tasikmalaya telah mengeluarkan peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun di lapangan belum terealisasikan sebagaimana tujuan dikeluarkannya Perda tersebut dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan sampah yang profesional sehingga terwujud kualitas lingkungan yang bersih serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sebagai kota yang dikenal dengan julukan "Kota Resik", Tasikmalaya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas regulasi serta rekomendasi kebijakan diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih profesional dan berkelanjutan.



TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Woll dalam (Agustina, 2024, p. 22) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan

“Sejumlah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.”

Menurut Pressman dan Widavsky dalam (Wahab, 2016, p. 15) mendefinisikan Kebijakan Publik adalah

“Sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan public itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kebijakan publik, dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi atau mengatasi masalah yang berkembang dilingkungan masyarakat.

Menurut Jones dalam (ishak, 2012, p. 89) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementations we mean that activities directed toward putting a program into effect.”

Yang memiliki arti bahwa:

“Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.”

Sedangkan menurut rasyid dalam (Alexander Phuk Tjilen, 2015, p. 24) mengemukakan pengertian implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi dari setiap kebijakan adalah birokrasi dan justru dalam implementasi itulah sesungguhnya suatu kebijakan di beri bentuk.”

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 (Suparyanto & Rosad, 2020), pengelolaan sampah mencakup pengurangan sampah dari sumbernya, pengolahan berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta pelibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam pengelolaannya. Sementara itu, Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 mengatur kebijakan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya.

Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Jika sampah tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat mencemari lingkungan, merusak kualitas air dan udara, serta mengganggu keseimbangan ekosistem, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mengatasi permasalahan ini dengan menerbitkan berbagai kebijakan, termasuk di Kota Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2015, pp. 9–10) berpendapat mengenai penelitian kualitatif adalah:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci,



Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

Sedangkan menurut Creswell dalam (Safrudin et al., 2023) menjelaskan bahwa:

“Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian pendidikan dimana peneliti bergantung pada pandangan partisipan atau informan : peneliti bertanya panjang lebar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum, pengumpulan data sebagian besar terdiri dari kata-kata (atau teks) dari peserta, menggambarkan dan menganalisis teks tersebut menjadi tema- tema dan melakukan permintaan secara subyektif dan secara bias (memancing pertanyaan lainnya).”

Berdasarkan pemahaman di atas, penelitian ini memerlukan penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Keputusan untuk menggunakan pendekatan ini didasarkan pada tujuan peneliti untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang fenomena yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, diharapkan peneliti dapat menggali dan memahami konteks serta makna dari pengalaman subjek penelitian, sehingga mereka dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang masalah yang sedang diteliti. Selain itu, pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan variabel dan interaksi yang relevan dalam situasi yang diteliti. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan ilmu pengelolaan.

Dalam penelitian ini, Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah menggunakan pendekatan *non probability sampling*. Menurut (Sugiyono, 2022, p. 218) mengemukakan “*Non probability Sampling* adalah teknik atau cara pengambilan sampling yang tidak memberi kesempatan/ peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, dan snowball*”.

Karena teknik sampling atau penarikan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel, peneliti memiliki fleksibilitas dalam menentukan informan yang relevan. Dalam konteks ini, peneliti memilih *metode Purposive Sampling*, yang dipilih karena dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat untuk mencapai tujuan penelitian.

Metode *Purposive Sampling* memungkinkan peneliti untuk secara selektif memilih orang atau informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau karakteristik tertentu yang dianggap penting. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan wawancara terhadap individu yang diyakini mampu memberikan informasi yang mendalam dan spesifik mengenai topik yang diteliti. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa peneliti dapat menggali perspektif yang bermanfaat dan data yang lebih kaya, yang tidak mungkin diperoleh melalui teknik sampling acak.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Penulis memperoleh informasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Sumber Pengelolaan Sampah Melalui Pendekatan 3r (*Reduce, Reuse, Recycle*) dari berbagai sumber guna menganalisis data yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan informan sebagai berikut:



1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Feri Arif Maulana)
2. Penyuluhan Lingkungan Hidup Ahli Muda Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Dewi Nursarini)
3. Ketua TPS3R Tunas Mulya Ciherang (Moch haerul ihsan)
4. Masyarakat setempat (Ibu Ade)

Untuk mengetahui bagaimana inovasi ini dilaksanakan penulis telah melaksanakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi menggunakan pisau asah parameter dari Smith dalam (Joko, 2022) :

1. *Idealized Policy* yaitu pada interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target *group* untuk melakukannya.
 2. Target *group* yaitu bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
 3. *Implementing organization* yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan
 4. *Environmental factors* unsur-unsur didalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
- Adapun lebih jelasnya yaitu sebagai berikut :

1. *Idealized Policy*

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya telah mengadopsi pendekatan *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) sebagai strategi utama untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna. Berbagai regulasi, seperti Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2019, telah disusun sebagai dasar hukum dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Selain itu, program-program strategis seperti pembentukan bank sampah, pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS 3R), serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga terus dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya.

Implementasi kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Keberadaan bank sampah di berbagai komunitas, sekolah, dan lingkungan perumahan telah membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi. Begitu pula dengan TPS 3R yang telah didirikan di beberapa lokasi, seperti Ciherang, Cipanyir, dan Sukajaya, yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan sampah berbasis komunitas. Sampah organik diolah menjadi kompos atau *eco-enzyme*, sementara sampah anorganik didaur ulang atau dijual kembali. Langkah-langkah ini tidak hanya berdampak pada pengurangan



beban sampah di TPA, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan.

Namun, meskipun telah banyak upaya dilakukan, implementasi kebijakan 3R di Kota Tasikmalaya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Masih banyak warga yang membuang sampah secara campuran, sehingga menyulitkan proses daur ulang dan pengolahan lebih lanjut. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kurangnya fasilitas pengolahan sampah dan keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lingkungan, turut menjadi kendala dalam optimalisasi sistem pengelolaan sampah berbasis 3R. Regulasi yang telah ditetapkan juga belum sepenuhnya efektif karena minimnya sanksi tegas bagi pelanggar, yang membuat sebagian masyarakat masih belum memiliki kedisiplinan dalam mengelola sampah dengan baik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi agar masyarakat semakin memahami pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah. Selain itu, perlu ada insentif atau penghargaan bagi masyarakat yang aktif dalam program 3R, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memilah dan mendaur ulang sampah. Penambahan fasilitas TPS 3R di lebih banyak wilayah, peningkatan jumlah tenaga penyuluh, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah juga menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R di Kota Tasikmalaya telah memberikan dampak positif dalam mengurangi beban TPA, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta menciptakan manfaat ekonomi dari sampah yang memiliki nilai jual. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lingkungan**. Dengan komitmen dan sinergi yang lebih kuat, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai daerah yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

2. *Implementing Organization*

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R di Kota Tasikmalaya telah berjalan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi terkait lainnya. Kebijakan ini mencakup koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta aparat kelurahan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, struktur organisasi dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan ini dapat berjalan secara efektif. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana masih menjadi kendala utama dalam optimalisasi kebijakan ini.

Dinas Lingkungan Hidup memainkan peran strategis dalam menyusun regulasi, mengoordinasikan program penyuluhan, serta mengawasi implementasi kebijakan.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai metode, seperti kampanye lingkungan, pelatihan, serta program edukasi di sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, evaluasi secara berkala dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan, termasuk dengan melihat pengurangan jumlah sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), peningkatan partisipasi masyarakat dalam program 3R, serta optimalisasi operasional bank sampah. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam sinergi antarinstansi dan dukungan kebijakan yang lebih kuat agar program ini dapat mencapai hasil yang lebih maksimal.

Peran TPS 3R seperti Cihorang Tunas Mulya juga sangat penting dalam mendukung kebijakan ini. TPS 3R bertindak sebagai pusat pemrosesan sampah yang berfokus pada pemilahan, pengolahan, dan edukasi masyarakat. Sampah organik diolah menjadi kompos atau pakan ternak, sementara sampah anorganik didaur ulang atau dijual kembali. Selain itu, TPS 3R juga berperan dalam menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang lebih produktif. Namun, keterbatasan fasilitas dan kurangnya jangkauan TPS 3R ke seluruh wilayah masih menjadi kendala yang harus segera diatasi agar dampaknya lebih luas.

Dari perspektif masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R mendapat apresiasi, tetapi masih dirasakan adanya kekurangan dalam implementasi, terutama dalam hal pemerataan fasilitas dan koordinasi antarinstansi. Beberapa wilayah belum mendapatkan akses yang optimal terhadap TPS 3R dan edukasi pemilahan sampah, yang menyebabkan program ini belum berjalan secara merata. Masyarakat berharap agar frekuensi penyuluhan ditingkatkan, fasilitas TPS 3R diperbanyak, serta koordinasi antara DLH, perangkat kelurahan, dan komunitas lokal diperkuat. Dukungan anggaran yang lebih besar dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah juga diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas program ini.

Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R di Kota Tasikmalaya telah menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lingkungan menjadi kunci utama dalam mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan peningkatan koordinasi, alokasi anggaran yang memadai, serta pemanfaatan teknologi yang lebih optimal, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kota Tasikmalaya.

3. *Target Group*

Kelompok sasaran dalam kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk rumah tangga, pelaku usaha, sektor pendidikan, dan komunitas lokal. Setiap kelompok memiliki peran yang berbeda dalam implementasi

kebijakan ini serta respons yang beragam terhadap upaya sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan.

Masyarakat rumah tangga memiliki peran yang sangat penting karena mereka merupakan penghasil sampah terbesar. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah telah meningkatkan kesadaran di kalangan warga, dan banyak yang mulai memilah sampah dari sumbernya. Namun, konsistensi dalam menerapkan kebiasaan ini masih menjadi tantangan, terutama karena kebiasaan lama yang sulit diubah. Beberapa warga mengaku masih sering merasa malas atau lupa dalam memilah sampah, apalagi jika tidak ada sistem yang jelas atau dampak langsung yang dirasakan dari kebiasaan tersebut.

Di sektor usaha dan industri kecil, ada pelaku usaha yang sudah mulai menerapkan sistem pengelolaan sampah dalam operasional mereka, tetapi belum semuanya memiliki kesadaran yang sama. Kesibukan dalam menjalankan usaha serta kurangnya insentif menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka. Di sisi lain, sektor pendidikan menunjukkan hasil yang lebih positif. Sekolah-sekolah yang telah berpartisipasi dalam program lingkungan aktif melakukan kegiatan seperti daur ulang dan lomba kebersihan, yang membantu menanamkan kesadaran sejak dini kepada anak-anak.

Komunitas lokal juga memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan ini. Kelompok pemuda dan organisasi masyarakat sering menginisiasi kegiatan gotong royong serta kampanye lingkungan. Namun, mereka masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya dan tenaga kerja. Di beberapa TPS 3R, misalnya, tenaga kerja yang terbatas menjadi salah satu hambatan utama dalam memilah sampah yang masih bercampur dari masyarakat. Meskipun ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk fasilitas seperti tempat pengolahan sampah dan mesin pencacah plastik, upaya ini masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih mudah menerapkan prinsip 3R.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan informasi, sulitnya mengubah kebiasaan lama, serta kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dengan pendekatan kreatif, seperti kampanye digital atau interaktif. Selain itu, pemberian insentif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam memilah sampah. Misalnya, warga yang disiplin memilah sampah bisa mendapatkan potongan retribusi sampah atau manfaat ekonomi melalui program bank sampah.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan ini. Dengan adanya sinergi yang lebih erat, diharapkan perubahan perilaku masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4. *Environmental Factor*

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kota Tasikmalaya telah memberikan dampak positif dalam mengurangi volume



sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kebijakan ini adalah faktor lingkungan, yang mencakup kondisi geografis, demografi, serta tantangan perubahan iklim. Di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, produksi sampah yang lebih besar mendorong perlunya strategi pengelolaan yang lebih efektif, seperti penyediaan fasilitas pemilahan sampah dan pengembangan program bank sampah. Dengan adanya bank sampah, masyarakat dapat menukarkan sampah anorganik dengan insentif ekonomi, sehingga mendorong kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya.

Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam penerapan kebijakan ini, salah satunya adalah keterbatasan lahan untuk pembuangan dan pengolahan sampah. Di Kota Tasikmalaya, ketersediaan lahan untuk TPA semakin berkurang, sehingga diperlukan solusi inovatif seperti optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) berbasis 3R dan pemanfaatan teknologi dalam proses daur ulang. Selain itu, perubahan iklim juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah, terutama saat musim hujan yang dapat menyebabkan tumpukan sampah menyumbat saluran air dan meningkatkan risiko banjir. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kolektif serta upaya yang lebih sistematis untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, TPS 3R Cihérang Tunas Mulya menjadi contoh bagaimana sistem pengelolaan sampah berbasis 3R dapat diterapkan secara efektif. Dengan adanya fasilitas ini, terjadi pengurangan signifikan terhadap sampah organik dan plastik yang sebelumnya dibuang sembarangan. Sampah organik diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang atau dijual kembali. Dampak positif lainnya adalah peningkatan kualitas lingkungan, terutama dalam mengurangi pencemaran udara akibat berkurangnya kebiasaan membakar sampah, serta menjaga kualitas tanah dan air dari limbah domestik.

Meskipun telah memberikan dampak positif, masih terdapat kendala yang harus diatasi, seperti kebiasaan masyarakat yang belum disiplin dalam memilah sampah dan keterbatasan dalam mengolah jenis sampah tertentu. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi digital untuk mengelola bank sampah, mesin pencacah plastik dan organik, serta teknologi pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan penting, di mana masyarakat perlu diedukasi untuk mengubah pola konsumsi yang menghasilkan banyak sampah.

Dukungan dari pihak swasta dan organisasi non-pemerintah juga memiliki peran strategis dalam memperkuat kebijakan ini, baik melalui pendanaan program lingkungan (CSR) maupun penciptaan pasar bagi produk daur ulang. Selain itu, faktor ekonomi turut menjadi penentu keberhasilan program 3R, karena jika produk daur ulang memiliki nilai ekonomi tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk memilah dan mendaur ulang

sampah. Dengan adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah, sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi, diharapkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kota Tasikmalaya dirancang untuk mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Beberapa faktor utama yang menjadi tantangan adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan ini.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya sebagai organisasi pelaksana telah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui edukasi masyarakat, penyediaan fasilitas, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten menjadi tantangan besar. Selain itu, faktor lingkungan, seperti ketersediaan lahan untuk tempat pengolahan sampah terpadu (TPS 3R) dan meningkatnya volume sampah, turut mempengaruhi efektivitas kebijakan ini.

Target utama dari kebijakan ini adalah masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas lingkungan. Keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, dukungan dari sektor swasta, serta koordinasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi, penyediaan infrastruktur yang lebih memadai, serta kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar kebijakan 3R dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. (2024). Menakar Arah Kebijakan Publik yang Sesuai Dengan Kehendak Rakyat. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(1), 20–24. <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i1.2205>
- Alexander Phuk Tjilen. (2015). *kebijakan publik*.
- ishak. (2012). *analisis kebijakan*.
- Joko, P. (2022). *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.

Sugiyono. (2015). *metode penelitan kualitatif*.

Sugiyono. (2022). *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*.

Wahab, S. A. (2016). *Analisis kebijakan*. 11–47.